

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018-2021**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi*



**Disusun oleh:**

**RAHMI FEBRIANI**  
**NPM : 211000462201036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
2023**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021**

RAHMI FEBRIANI  
211000462201036

PEMBIMBING : 1. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si  
2. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.

Berdasarkan analisis statistik dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $3,389 > 1,993$ . Variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $7,778 > 1,993$ . Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap variabel belanja modal, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F$  hitung sebesar  $34,487 > 3,12$ . Nilai koefisien determinasi sebesar 0,486 atau 48,6% mengindikasikan bahwa 48,6% variabel anggaran belanja modal dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021**

RAHMI FEBRIANI

211000462201036

PEMBIMBING : 1. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si  
2. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.

Berdasarkan analisis statistik dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar  $3,389 > 1,993$ . Variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar  $7,778 > 1,993$ . Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap variabel belanja modal, hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar  $34,487 > 3,12$ . Nilai koefisien determinasi sebesar 0,486 atau 48,6% mengindikasikan bahwa 48,6% variabel anggaran belanja modal dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

***The Effect of Regional Economic Growth and Special Allocation Funds on Capital Expenditures of Regency/City Regional Governments in West Sumatra Province in 2018-2021***

RAHMI FEBRIANI

211000462201036

PEMBIMBING : 1. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si

2. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Effect of Regional Economic Growth and Special Allocation Funds on Capital Expenditures of District/City Governments in West Sumatra Province in 2018-2021. The sample used is 19 cities/regencies in West Sumatra Province in 2018-2021. The sampling technique uses total sampling.*

*Based on statistical analysis, it can be concluded that partially the economic growth variable has a significant effect on Capital Expenditures, this is evidenced by the t-value of  $3.389 > 1.993$ . The Special Allocation Fund variable partially has a significant effect on the Capital Expenditures variable, this is evidenced by the t-value of  $7.778 > 1.993$ . The Economic Growth and Special Allocation Fund variables simultaneously affect the capital expenditure variable, this is evidenced by the calculated F value of  $34.487 > 3.12$ . The determination coefficient value of 0.486 or 48.6% indicates that 48.6% of the capital expenditure budget variables are explained by the independent variables in this study, namely economic growth and special allocation funds, while the remaining 51.4% are influenced or explained by other variables that are not examined in this study.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas gagasan sendiri yang disesuaikan dengan kepentingan dan potensi masing-masing daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proposional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam daerahnya sendiri. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki wewenang untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran. Belanja Modal yang merupakan sebuah proses yang sarat dengan

kepentingan kepentingan politis. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dalam pembelian dan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dana atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah (Endri, et al., 2021). Namun dalam proses peningkatan anggaran Belanja Modal yang ada di daerah memiliki berbagai macam kendala yang perlu diatasi oleh Pemerintah daerah.

Berikut ini adalah Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2020:

**Tabel 1**  
**Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018-2020**

No	Kabupaten/ Kota	Belanja Modal		
		2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	Rp 222,209,809,952	Rp297,673,042,277	Rp 142,003,462,707
2	Pesisir Selatan	Rp 257,286,726,595	Rp324,875,576,584	Rp 261,934,632,557
3	Kab.Solok	Rp 167,162,730,044	Rp194,815,396,238	Rp 110,707,851,887
4	Sijunjung	Rp 205,818,505,036	Rp204,210,889,586	Rp 143,523,327,717
5	Tanah Datar	Rp 165,134,741,679	Rp202,885,384,185	Rp 107,785,756,266
6	Padang Pariaman	Rp 262,953,914,380	Rp263,182,047,537	Rp 182,335,821,634
7	Agam	Rp 212,319,559,024	Rp280,827,672,997	Rp 135,090,687,654
8	Lima Puluh Kota	Rp 232,636,603,714	Rp252,910,521,752	Rp 152,712,089,645
9	Pasaman	Rp 140,813,280,729	Rp125,911,245,748	Rp 125,376,390,296
10	Solok Selatan	Rp 196,414,321,045	Rp210,375,471,214	Rp 124,575,198,868
11	Dharmasraya	Rp 215,526,960,835	Rp226,598,089,917	Rp 194,525,452,178
12	Pasaman Barat	Rp 327,268,292,282	Rp261,167,537,748	Rp 182,357,589,117
13	Padang	Rp 419,839,593,968	Rp491,009,055,950	Rp 304,791,762,149
14	Kota Solok	Rp 159,588,101,391	Rp115,013,289,928	Rp 32,739,382,912
15	Sawahlunto	Rp 77,527,748,798	Rp 94,384,258,019	Rp 63,699,147,393
16	Padang Panjang	Rp 125,026,313,035	Rp 98,188,781,548	Rp 54,603,589,784
17	Bukittinggi	Rp 178,010,817,194	Rp187,986,455,097	Rp 249,317,613,815
18	Payakumbuh	Rp 149,445,424,991	Rp182,218,048,171	Rp 119,993,262,139
19	Pariaman	Rp 132,430,598,581	Rp156,394,642,681	Rp 94,469,539,442

Sumber : (LRA Kab/Kota di Prov.Sumbar TA 2018-2020)

Fenomena yang terjadi yang mana terdapat perbedaan jumlah belanja modal tiap tahunnya, umumnya belanja modal mengalami kenaikan setiap tahun. Menurut (Endri, et al., 2021) setiap daerah mempunyai tingkat kemandirian daerah serta kemampuan keuangan yang tidak sama saat mendanai kegiatannya, mengakibatkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dan daerah lainnya. Mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Oleh sebab itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam membuat rencana keuangannya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berpengaruh pada kemajuan daerah (Rahayu, 2019).

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Nuarisa, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Nuarisa, 2013). Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Derkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi antara penyerahan



kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakan untuk member pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pengalihan dana yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu disebut Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah yaitu merupakan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus ditujukan pada kegiatan investasi pengadaan, pembangunan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang mempunyai umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Adanya pengalokasian DAK diharapkan bisa mempengaruhi belanja modal, karena DAK guna meningkatkan pelayanan publik cenderung menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Pada peneliti terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda, yaitu Novalia (2016) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Endri (2021) mengemukakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Aryani (2017) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Nuarisa (2013) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan garis besar penyusunan yang mempermudah pemikiran dalam memahami secara keseluruhan isi proposal, sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan review penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, Teknik pengumpulan data, dan variabel- variabel yang ada dalam penelitian, serta defenisi operasional dari penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran baik untuk peneliti selanjutnya.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kab/ Kota di Sumatera Barat periode 2018-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 3,389 dan signifikansi 0,001. Nilai  $t$  tabel menunjukkan angka 1,993, dengan demikian nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $3,389 > 1,993$ ) dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Anggaran Belanja Modal. Maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal diterima.
2. Dari hasil analisis data untuk variabel dana alokasi khusus diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 7,778 dan signifikansi 0,000. Nilai  $t$  tabel menunjukkan angka 1,993, dengan demikian nilai  $t$  hitung besar dari nilai  $t$  tabel ( $7,778 > 1,993$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap variabel Anggaran Belanja Modal. Maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal diterima.



3. Dari hasil analisis data diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 34,487 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai F tabel adalah sebesar 3,12. Dengan demikian, nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( $34,487 > 3,12$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) secara simultan atau bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Maka hipotesis ketiga yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Anggaran Belanja Modal diterima.
4. Dapat dilihat bahwa nilai *R Square* adalah 0,486 atau 48,6 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 48,6% variabel anggaran belanja modal dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan sisa lebih anggaran pembiayaan (SILPA).

## 5.2 Saran

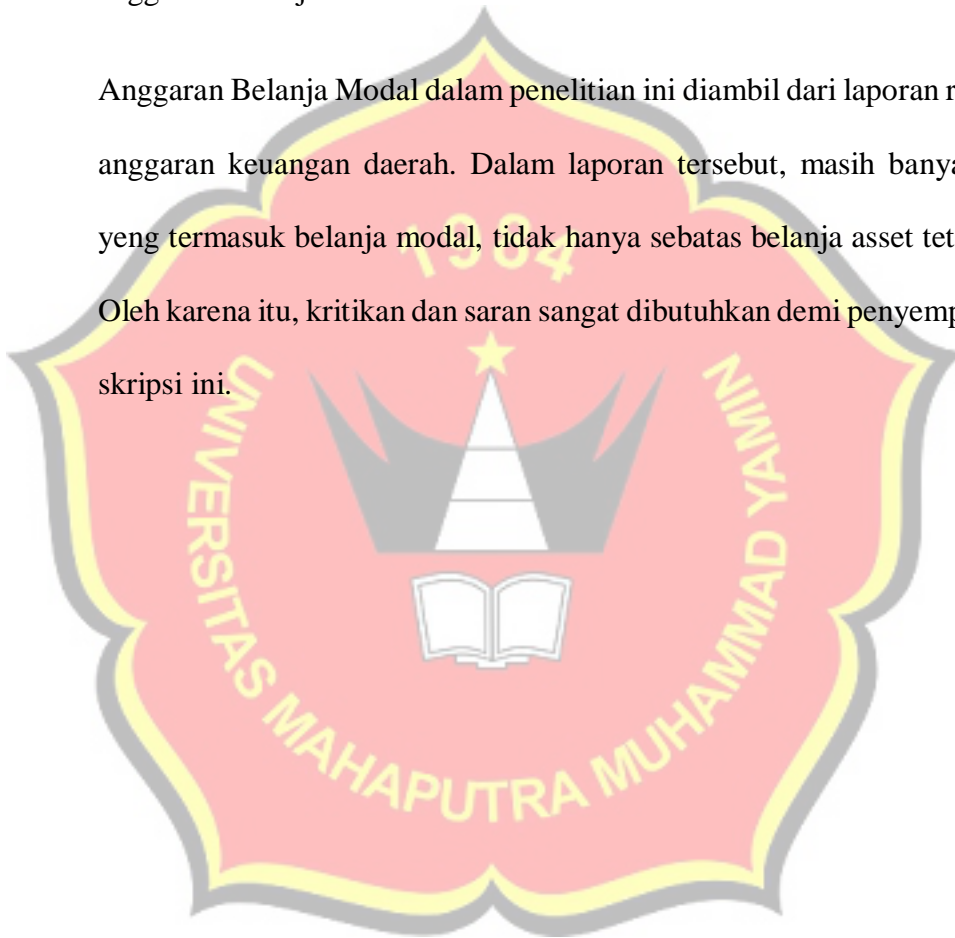
Berdasarkan hasil penelitian skripsi tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021” peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari tingginya PDRB daerah tersebut. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan, alangkah lebih baiknya jika peneliti membandingkan terlebih dahulu antara PDRB berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga pasar.

## 2. Anggaran Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi anggaran keuangan daerah. Dalam laporan tersebut, masih banyak item yang termasuk belanja modal, tidak hanya sebatas belanja asset tetap saja. Oleh karena itu, kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi penyempurnaan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Putri Reno. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan." *Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arwati, Dini, and Novita Hadiati. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat." *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 2* (1): 498–507.
- Ayem, Sri, and Dessy Dyah Pratama. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016." *Akuntansi Dewantara* 2 (2): 169–82. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Dalil, Ahmad, Sukidin` Sukidin, and Wiwin Hartanto. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018." *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 14 (1): 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>.
- Dina Sandi, Putu Kepramareni & Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA* 1 (1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Deva Yoga Permana, Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (9): 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Eka Putri Wahyuningtyas, Muslichah, Dwiyani Sudaryanti. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah/Kota Jombang Tahun 2009-2018)." *E-Jra* 09 (10): 127–40.
- Endri, Fauziah, Yengsih, Yeni Fafika, Sabri, Nasfi. 2021. Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Journal Islamic of Economics*. Vol 2 (2). Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim

Bukittinggi.

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasnur, A. Firman. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Indriyani, I., & Adi, S. W. 2018. "Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0. *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0,*" 261–70.
- Mayasari, Luh Putu Rani, Sinarwati, Ni Kadek dan Yuniarta, Adi. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* : Vol 2 (1).
- Mubasiroh, Lailatul. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. 2019. Pengaruh Implementasi E Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Novalia, Nanda Dwi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandar Lampung.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Accounting Analysis Journal* 2 (4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pungky Puspita Sari, Febra Robiyanto. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Se Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)." *Accounting Global Journal* 1 (1): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

- Saputra, Anas Tinton. 2015. "Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013." *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Siregar, B. 2015. Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siswiyanti, Punky. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.
- Rahayu, Resti. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat.
- Rahardjo, Shiddiq Nur, Permana, Deva Yoga. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 (4)
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Kencana, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wandira. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Universitas Diponegoro.